

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta Nawa yang berarti (Sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks politik Indonesia khususnya menjelang pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan Sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Intisari dari Program Nawa Cita tersebut adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional, mewujudkan

kemandirian ekonomi dengan mengerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik, merevolusi karakter bangsa diwujudkan melalui kebijakan restrukturisasi kurikulum pendidikan nasional dengan mempromosikan aspek-aspek pendidikan kewarganegaraan, dan memperkuat prakarsa Bhenika Tunggal Ika dan memperkuat Indonesia melalui sosial.

Setelah terpilih menjadi Presiden, Jokowi menerapkan Nawa Cita ke dalam program-program pemerintahannya melalui sebuah kabinet yang disebut Kabinet kerja. Komposisi dan struktur Kabinet Kerja dirancang untuk mengakomodir agenda-agenda yang termuat dalam Nawa Cita. Dia mengubah nomenklatur beberapa kementerian dan menambah jumlah koordinator, yakni: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dibentuk untuk menggalakkan pembangunan serta menegakkan kedaulatan Indonesia di bidang kemaritiman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dibentuk untuk mengkoordinir pembangunan karakter berlandaskan budaya bangsa, Menteri Koordinator dan Pendidikan Dasar dan Menengah disiapkan Bidang Pendidikan tinggi yang sebelumnya merupakan satu kesatuan agar pembangunan karakter dan budaya bangsa melalui pendidikan dapat ditangani, Kementerian Pariwisata dipisahkan dari bidang ekonomi kreatif agar kedua bidang tersebut dikelola secara serius dan dapat menjadi salah satu andalan Indonesia dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. (Wikipedia, 2020)

Menurut (Neno, 2018) pariwisata saat ini merupakan bentuk nyata dari perjalanan sebuah bisnis global yang sangat menjanjikan karena diperkirakan akan menjadi sebuah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi

dunia yang dihasilkan dari pergerakan wisatawannya. Pemangku kepentingan dalam pariwisata meliputi 3 (tiga) pihak yaitu: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, ketiga pihak tersebut harus bersinergi dan berkolaborasi dalam mengoptimalkan pengalaman pengunjung di destinasi. Agar tercipta kolaborasi yang kompak (*cohesive collaboration*). (Nurdin Hidayah, 2017)

Menurut Suhariyanto selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), potensi unggulan desa adalah melalui sektor wisata. Tercatat dari potensi Desa (Podes) 2018 terdapat 1.734 desa wisata di seluruh Indonesia. Dimana Pulau Jawa-Bali menempati posisi paling tinggi dengan 857 desa wisata. Kemudian di ikuti dengan Sumatera sebanyak 355 desa, NTT 189 desa, Kalimantan 1717 desa. Selain itu, Pulau Sulawesi juga tercatat sebesar 119 desa wisata, Papua 74 desa, dan Maluku sebanyak 23 desa. (Media.com, 2018)

Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata. Mulai dari kerangka perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan, dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap upaya atau program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan posisi, potensi, dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan salah satu konsep yang menjelaskan peran masyarakat tersebut dalam pembangunan pariwisata adalah *Community Based Tourism (CBT)*. (Neno, 2018)

Menurut (Hudson, et al., 2018) *Community Based Tourism* merupakan pelibatan masyarakat dengan kepastian manfaat. Yang diperoleh oleh

masyarakat melalui upaya perencanaan pendampingan yang yang membela masyarakat lokal. Serta kelompok lain yang memiliki antusias atau minat kepada kepariwisataan, dengan pengelolaan pariwisata yang memberi peluang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pariwisata berbasis masyarakat berkaitan dengan adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat sebagai pengelola dalam pembangunan pariwisata yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata terdiri dari atas dua maksud, yaitu dalam mekanisme pengambilan keputusan. Dan partisipasi dalam menerima keuntungan dari pengelolaan desa wisata.

Hingga kini, pengembangan dan pertumbuhan desa wisata menyebar ke seluruh Provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Jombang. Pemerintah ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Menurut data pengunjung daya tarik wisata Kabupaten Jombang tahun 2018 jumlah wisatawan mencapai 181.685 pengunjung. (Badan Pusat Statistik Jombang, 2018)

Disamping itu pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Dengan adanya pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Dengan kata lain pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat akan saling diuntungkan. Pengembangan tersebut hendaknya sangat memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan

wisata. Pada dasarnya pengembangan pariwisata dilakukan untuk meminimalkan permasalahan (Rahayu, et al., n.d.)

Perkembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainability tourism*) dimaksudkan sebagai proses pembangunan pariwisata yang berorientasi pada kelestarian sumberdaya yang akan dibutuhkan untuk kemajuan dalam pembangunan pariwisata pada masa mendatang. Organisasi pariwisata dunia PBB (UNWTO) menjelaskan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan, pariwisata harus menghitung tentang dampak ekonomi, sosial, lingkungan untuk saat ini dan masa yang akan datang, harus dapat menangani yang dibutuhkan oleh pengunjung lingkungan serta masyarakat sekitar.

Desa wisata menjadi suatu bentuk wisata alternative yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat. Tentunya pengelolaan desa wisata tersebut harus terarah sesuai dengan kaidah-kaidah keberlanjutann dan antar pemangku kepentingan harus berkerjasama satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji pengembangan desa wisata yang berjudul “ Penerapan Konsep *Community Based Tourism* pada *Sustainable Tourism* dalam menunjang Pendapatan Asli Desa (PAD)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana penerapan konsep *Community Based Tourism* pada *Sustainable Tourism* dalam menunjang Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan Studi Kasus Pada Wisata Sumber Biru Wonosalam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui penerapan konsep *Community Based Tourism* pada *Sustainable Tourism* dalam menunjang Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan Studi Kasus Pada Wisata Sumber Biru Wonosalam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis:

Berikut manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan kajian dalam penerapan pengetahuan yan diperoleh di Perguruan Tinggi khususnya Program Studi Akuntansi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta nantinya dapat dijadikan bahan penunjang untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang konsep CBT.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan.